

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KAPITALISASI PASAR**

**Henni Indriyani¹ dan Citra Indah Merina²
Dosen Universitas Bina Darma¹
Dosen PNS Dpk pada Universitas Bina Darma²
Jalan Jendral Ahmad Yani No.12 Palembang
Pos-el: henniinayah@yahoo.com¹,Citra_ims@yahoo.com**

Abstract :

Abstrak: Pengungkapan CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Meskipun dana yang digulirkan perusahaan di Indonesia untuk CSR sudah cukup besar, namun kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas sosial dalam laporan tahunan masih sangat rendah. Berdasarkan fenomena yang ada penulis tertarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pengaruh pengungkapan CSR tersebut terhadap kapitalisasi pasar, dengan menggunakan standar pengungkapan CSR yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI). Faktor-faktor pengungkapan CSR yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham asing, kepemilikan saham pemerintah, dan profitabilitas.

Kata Kunci: *pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), kepemilikan saham asing, kepemilikan saham pemerintah, profitabilitas, kapitalisasi pasar.*

I. PENDAHULUAN

Keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat telah menciptakan berbagai manfaat seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran, namun aktivitas produksi yang dilakukan perusahaan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Beberapa kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia seperti kasus Lapindo Brantas dan kasus Newmont Minahasa Raya merupakan contoh dampak negatif yang disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga melakukan eksploitasi sumber daya alam dan sosial dengan tidak terkendali.

Dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan ini menumbuhkan kesadaran publik, kritik serta tekanan dari berbagai pihak dan memaksa perusahaan untuk

menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat, dan perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab.

Sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat kepada perusahaan yang semakin besar maka pada tahun 1970-an muncul konsep akuntansi baru yang disebut Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (*Social Responsibility Accounting*) yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan perusahaan dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Pengimplementasian akuntansi pertanggungjawaban sosial pada perusahaan disebut juga tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan aktivitas sosial perusahaan walaupun tidak menamainya sebagai CSR. Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam segi

kuantitas maupun kualitas. Selain kegiatan dan pengelolaannya yang semakin bervariasi, jumlah dana yang dialokasikan dalam penerapan CSR juga semakin besar. Menurut Forum CSR Kesejahteraan Sosial, dana yang digulirkan perusahaan di Indonesia untuk CSR pada tahun 2012 mencapai Rp 10 triliun, dimana Rp 4 triliun berasal dari BUMN dan Rp 6 triliun berasal dari perusahaan swasta. Meskipun dana ini masih sangat kecil dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, namun angka kumulatif tersebut menunjukkan perkembangan CSR di Indonesia cukup menggembirakan.

Jika dihubungkan dengan regulasi, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijabarkan lebih jauh dalam Peraturan Menteri

BUMN No. 4 Tahun 2007. Regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Walaupun penerapan CSR di Indonesia mulai berkembang, pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan masih bersifat sukalera (*voluntary*). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Paragraf kesembilan dinyatakan bahwa industri dimana lingkungan hidup memiliki peranan penting dapat

menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value-added statement*). PSAK tersebut tidak secara tegas mengharuskan perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosial mereka. Pengelompokan, pengukuran, dan pelaporan juga belum diatur. Pelaporan tanggung jawab sosial diserahkan pada masing-masing perusahaan. Tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah terlebih belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR sehingga masing-masing perusahaan menafsirkan sendiri bagaimana format pelaporan CSR. Hal ini menyebabkan kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas sosial dalam laporan tahunan masih sangat rendah.

Banyak perusahaan yang beranggapan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bagian dari strategi perusahaan. Perusahaan

semakin menyadari pentingnya menerapkan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Survey global yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan bahwa 88% eksekutif dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan mereka (Untung, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dalam laporan keuangan berkorelasi dengan harga saham perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pengaruh pengungkapan CSR tersebut terhadap kapitalisasi pasar.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam bahasa Indonesia, *Corporate Social Responsibility* atau CSR berarti tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi tanggung jawab sosial adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004).

Seluruh pelaksanaan CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para

pengambil keputusan. Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004, paragraf kesembilan: "Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting". Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan) di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan

kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham.

Dalam proses pelaporan keuangan tahunan perusahaan, pengungkapan (*disclosure*) merupakan aspek pelaporan yang kualitatif, yang sangat diperlukan pemakai informasi laporan keuangan. Oleh karena sifatnya yang kualitatif, format pengungkapannya tidak terstruktur yang dapat dilakukan secara langsung dalam laporan keuangan tahunan perusahaan melalui penjudulan yang tepat, catatan atas laporan keuangan ataupun berbagai sisipan seperti catatan kaki.

Informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diuraikan dalam laporan tahunan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan tahunan tersebut dilengkapi dengan pengungkapan sosial yang memadai. Memberikan informasi yang memadai diharapkan akan dapat berguna

bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela telah diteliti dalam penelitian sebelumnya, diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor (Deegan dan Blomquist, 2001; Hasnas, 1998; Patten, 1992; dalam Basamalah et al, 2005).

Berikut kerangka pemikiran dalam perumusan hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini:

1. Kepemilikan Saham Asing dan Pengungkapan CSR

Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*-nya dimana secara

tipikal berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995 dalam Barkemeyer, 2007). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam melihat luas pengungkapan CSR dalam laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Jepang membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan penelitian Susanto (1994) dalam Marwata (2006) meneliti luas

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI menemukan kepemilikan saham oleh investor asing tidak memiliki hubungan dengan luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.

Penerapan CSR di Indonesia dapat diindikasikan sebagai akibat peningkatan nilai perusahaan asing setelah menerapkan CSR di dalam operasional perusahaan. Nilai-nilai tersebut diterapkan oleh perusahaan yang dibentuk oleh para investor asing dalam kegiatan operasional perusahaan di Indonesia. Perusahaan berbasis asing memiliki teknologi yang cukup, *skill* karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan melakukan *disclosure* secara luas.

Selain itu, Simerly dan Li (dalam Mahmud dan Djakman; 2006) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham asing dianggap lebih *concern* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini didasarkan atas

negara-negara Eropa dan Amerika sangat memperhatikan isu-isu sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar serta pencemaran air. Oleh karena itu, perusahaan multinasional lebih memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam beroperasi untuk menjaga legitimasi perusahaan. Dengan kata lain, apabila perusahaan di Indonesia memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan asumsi bahwa negara-negara asing cenderung lebih perhatian terhadap aktivitas serta pengungkapan CSR, maka penelitian ini mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Diduga terdapat pengaruh positif antara besarnya kepemilikan saham asing dan pengungkapan

CSR.

2. Kepemilikan Saham Pemerintah dan Pengungkapan CSR

Kepemilikan saham pemerintah (*government shareholding*) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi, 2008).

Perusahaan sejenis ini di Indonesia disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga *stakeholder* utama perusahaan ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, BUMN berpedoman kepada perundang-undangan

dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, BUMN akan mendapatkan sorotan yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Kepemilikan saham oleh pemerintah menyebabkan perusahaan tersebut dalam menjalankan aktivitasnya harus selaras dengan kepentingan pemerintah. Pemerintah berhak menunjuk direktur perusahaan tersebut sehingga keputusan bisnis yang diambil merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan pemerintah (Amran dan Devi, 2008). Perusahaan akan mendapatkan sorotan yang lebih besar oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan

BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Tekanan pemerintah dan publik yang kuat membuat perusahaan ini harus lebih transparan dalam pengelolaannya. Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai salah satu media pelaporan pertanggungjawaban manajemen mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR di Malaysia. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Diduga terdapat pengaruh positif antara besarnya kepemilikan

saham pemerintah terhadap pengungkapan CSR.

3. Profitabilitas dan Pengungkapan CSR

Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham [Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996)], sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996)]. Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan

kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*. Vence (1975) dalam Belkaoui & Karpik (1989) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

Penelitian ilmiah terhadap hubungan profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memperlihatkan hasil yang sangat beragam. Donovan dan Gibson (2000) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang

dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “*goodnews*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.

Secara teoritis, menurut Kokubu *et al* (2001) terdapat hubungan positif antara kinerja ekonomi suatu perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi dengan premis bahwa perolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini:

H3: Diduga terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dan pengungkapan CSR

4. Pengungkapan CSR dan Kapitalisasi Pasar

Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi yang tepat, akurat, serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Suatu informasi dapat dikatakan mempunyai nilai guna bagi investor apabila informasi tersebut memberikan reaksi untuk melakukan transaksi di pasar modal. Hal ini dapat dilihat melalui perubahan harga saham dan aktivitas volume perdagangan saham.

Gray *et al*. (2001) menyatakan bahwa informasi sosial dan lingkungan dibutuhkan investor untuk pengambilan keputusan investasi. Kelana dan Wijaya dalam Nurdin (2006) menyatakan bahwa aspek kepercayaan (*belief*) dari investor merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam pasar saham. Oleh

sebab itu, suatu pengumuman atau pengungkapan akan ditanggapi beragam oleh para investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Wijayanti (2007) memperoleh hasil bahwa *environmental disclosure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *economic performance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2006) yang meneliti pengaruh kualitas pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan terhadap reaksi investor. Hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.

Harga pasar merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena harga pasar merupakan harga satuan suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Robert (1997) menyatakan harga pasar dikalikan dengan jumlah saham yang beredar akan menghasilkan *market value* atau disebut kapitalisasi pasar (*market capitalization*).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4 : Diduga terdapat pengaruh positif antara pengungkapan CSR dan kapitalisasi pasar.

Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan suatu pemahaman yang realistis tentang pengaruh dari kepemilikan saham asing, kepemilikan saham pemerintah, dan profitabilitasterhadap pengungkapan CSR perusahaan *go public* di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kapitalisasi pasar. Penelitian ini juga dapat digunakan baik oleh investor maupun calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi di pasar modal.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013.

Sektor-sektor yang tergolong sebagai perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 138 perusahaan manufaktur.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah : (1) Perusahaan yang terdaftar di BEI dan sahamnya aktif diperdagangkan selama periode penelitian, (2) Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan periode penelitian serta menyerahkan laporan tahunannya tersebut kepada BAPEPAM-LK dan telah mempublikasikannya, serta (3) Informasi pengungkapan sosial diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Variabel Independen

a. Kepemilikan Saham Asing

Kepemilikan saham asing dalam penelitian ini menggunakan persentase kepemilikan saham pihak/entitas asing (luar negeri). Kepemilikan tersebut minimal sebesar 5% yang dilihat dari laporan tahunan perusahaan. Besarnya saham pihak/entitas asing diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham asing terhadap total saham perusahaan.

b. Kepemilikan Saham Pemerintah

Kepemilikan saham pemerintah dalam penelitian ini menggunakan persentase kepemilikan saham Pemerintah Indonesia. Kepemilikan tersebut minimal sebesar 5%

yang dilihat dari laporan tahunan perusahaan. Besarnya saham pemerintah diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham pemerintah terhadap total saham perusahaan.

c. Profitabilitas (ROA)

Return on Asset (ROA) digunakan sebagai proksi dari profitabilitas. ROA diperoleh dengan cara membagi total laba bersih perusahaan dengan total aktiva.

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yang pertama ialah pengungkapan CSR. Variabel pengungkapan CSR ini juga sekaligus menjadi variabel independen untuk pengujian hipotesis tahap kedua. Pengungkapan CSR ialah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di

dalam laporan tahunan perusahaan. Untuk mengukur *social disclosure* ini digunakan CSDI (*Corporate Social Disclosure Index*) yang merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan sampel atas pengungkapan sosial yang dilakukannya, dimana instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 79 item pengungkapan yang mengacu pada indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*) yang diperoleh dari website www.globalreporting.org

Pendekatan untuk menghitung CSDI menggunakan *content analysis* dalam mengukur *variety* dari CSDI. Pendekatan ini menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item tanggung jawab sosial dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika

tidak diungkapkan (Haniffa et al., 2005 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut :

$$CSDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

$CSDI_j$ = *Corporate Social Disclosure Index* perusahaan

n_j = jumlah item yang harus diungkapkan, $n_j = 79$

X_{ij} = jumlah item yang diungkapkan : 1 = jika item i diungkapkan;

0 = jika item i tidak diungkapkan

Variabel dependen yang kedua dalam penelitian ini ialah Kapitalisasi Pasar (*Market Capitalization*). Kapitalisasi pasar diukur dengan mengalikan harga pasar saham dengan jumlah saham yang

beredar. Data nilai kapitalisasi pasar merupakan harga penutupan (*closing price*) yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Rumus untuk menghitung kapitalisasi pasar ialah sebagai berikut:

$$\text{Kapitalisasi Pasar} = \text{Harga Pasar Saham} \times \text{Jumlah Saham yang Beredar}$$

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari variabel yang diamati dan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan persamaan regresi.

3.4 Model Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model pengujian regresi dengan bantuan *software* SPSS versi 22. Analisis regresi pada dasarnya adalah

studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Tahapan pengujian terdiri atas dua tahap. Pengujian pertama yaitu menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan tahapan pengujian kedua ialah menguji hipotesis keempat. Tahapan pertama, yaitu pengujian antara variabel pengungkapan CSR dengan besarnya kepemilikan saham asing, kepemilikan saham pemerintah, dan profitabilitas, dimana hubungan antara variabel-variabel ditransformasikan ke dalam persamaan regresi berikut sebagai berikut:

$$Y1 = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 +$$

ε

Keterangan:

$Y1 = \text{Corporate Social Disclosure Index}$

$X1 = \text{Kepemilikan Saham Asing}$

$X2 = \text{Kepemilikan Saham Pemerintah}$

$X3 = \text{Profitabilitas}$

$\varepsilon = \text{error term}$

Tahapan kedua, yaitu pengujian antara variabel Kapitalisasi Pasar dan Pengungkapan CSR, dimana hubungan antar variabel ditransformasikan ke dalam persamaan regresi berikut sebagai berikut:

$$Y2 = \alpha + \beta X4 + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y2 = \text{Kapitalisasi Pasar}$

$X4 = \text{Corporate Social Disclosure Index}$

3.5 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum meregresi data dan melihat hubungan antar variabel maka perlu dilakukan uji asumsi klasik regresi terlebih dahulu agar model regresi dapat menghasilkan penduga yang tidak bias (sahih). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, otokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

Uji gejala multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai r^2 (*correlation matrix of coefficient*) dari hasil regresi antar variabel bebas pada model dan membandingkan dengan

koefisien determinasi (R^2) pada awal modelnya. Apabila r^2 lebih besar atau sama dengan R^2 , maka tingkat multikolinearitas yang terjadi cukup tinggi sehingga memahayakan interpretasi hasil. Apabila r^2 lebih kecil dari R^2 maka tingkat multikolinearitas yang terjadi cukup kecil sehingga tidak mengganggu interpretasi hasil (Firdaus, 2004). Uji multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai VIF dari hasil regresi dengan batasan toleransi dibawah angka lima maka dapat dikatakan bahwa model bebas dari gejala multikolinearitas (Santosa, 2002).

Uji autokolerasi dapat dilakukan dengan nilai d Durbin-Watson. Menurut Gujarati jika nilai d diantara $2d$ dan $4-2d$ maka tidak ada autokolerasi dalam model akan tetapi jika $2d > d > 4-2d$ maka terjadi autokolerasi (Gujarati, 1978).

Untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel terikat dilakukan dengan uji t dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} lebih

kecil t_{tabel} maka variabel bebas tidak signifikan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Signifikansi pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat diuji dengan menggunakan uji F. Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Firdaus, 2004).

4. PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis statistik terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi agar analisis regresi dapat dilakukan, baik untuk keperluan prediksi maupun untuk pengujian hipotesis yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan normalitas.

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen dijelaskan variabel independen lainnya. Suatu model regresi dikatakan adanya multikolinieritas adalah apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan VIF lebih dari 10.

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi yang diajukan bebas dari multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *Scatterplot* yang menunjukkan bahwa data tersebut terlihat tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal dan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian dengan analisis grafik histogram menunjukkan bahwa model regresi terdistribusi dengan normal karena grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Namun untuk memperkuat pengujian normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov adalah jika nilai probabilitas untuk residual lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk variabel residual sebesar 0,388 dan signifikan pada 0,998 diatas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi normal yang memperkuat hasil pengujian dengan menggunakan grafik histogram.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan maka dapat diambil simpulan sementara bahwa data yang diperoleh adalah terdistribusi normal, dalam model regresi tidak terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen (bebas multikolinearitas), serta tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Tuwajri, Sulaiman A., Christensen, T. E. and Hughes II, K. E. 2004. The Relations among Environmental Disclosure, Environmental Performance, and Economic Performance : A Simultaneous Equations Approach. *Accounting Organizations and Society* 29 : 447-471.
- Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang. Agustus 23-26, 2006.
- Belkaoui, A. and Karpik, P.G. 1989. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 2 (1) : 36-51.
- Darwin, Ali. 2004. Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*. Yogyakarta, 13-15 Desember.
- Donovan, Gary and Kathy Gibson. 2000. Environmental Disclosure in the Corporate Annual Report: A Longitudinal Australian Study. *Paper for Presentation in the 6th Interdisciplinary Environmental Association Conference*, Montreal, Canada.
- Gray, R., Javad, M., Power, David M., and Sinclair C. Donald. 2001. Social and Environmental Disclosure, and Corporate Characteristic: A Research Note and Extension. *Journal of*

- Business Finance and Accounting* 28 (3) :327-356.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Basic Econometrics*. 3rded. International Edition. McGraw-Hill.
- Hackston, David and Milne, Marcus J. 1996. Some Determinants Of Social And Environmental Disclosures In New Zealand Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 9 (1) : 77-108
- Harahap, Sofyan Safri. 1993. *Teori Akuntansi*. Edisi Kesatu, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Henny dan Murtanto. 2001. Analisis Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* 1 (2) : 21-48
- Kumalahadi. 2000. Perspektif Pragmatik Lingkungan dan Sosial dalam Laporan Keuangan: Peningkatan Kegunaan dan Pertanggungjawaban. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 4 : 51-66
- Lindrianasari. 2007. Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia. *JAAI* 11 (2) : 159-172.
- Mathews, M.R. 1997. Twenty-Five Years Of Social And Environmental Accounting Research: Is There A Silver Jubilee To Celebrate? *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 10 (4) : 487-531.
- Mirfazli, Edwin dan Nurdiono. 2007. Evaluasi Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan dalam Kelompok Aneka Industri yang Go Publik di BEJ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 12 (1) : 1-11.
- Rakhiemah, Adilla Noor dan Agustia, Dian. 2009. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang, November 4-6.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo, September 15-16.
- Suratno, Ignatius Bondan, dkk. 2006. Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang, Agustus, 23-26.
- Utomo, Muhammad Muslim. 2000. Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi III* : 99-122.
- Zeghal, Daniel and Ahmed, Sadrudin A. 1990. Comparison of Social Responsibility Information Disclosure Media Used by Canadian Firms. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 3 (1) : 38-53.